

**SKRIPSI**

***NILAM INDRIANI***

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
REPRODUKSI PADA TENAGA KERJA WANITA**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

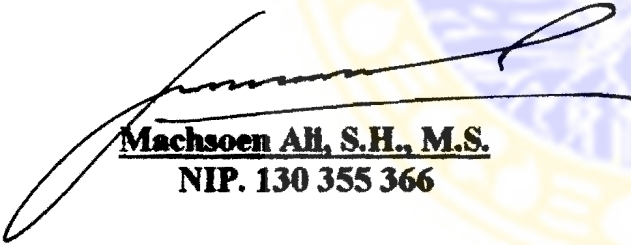
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
REPRODUKSI PADA TENAGA KERJA WANITA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**



**Nilam Indriani**  
**NIM. 039614331**

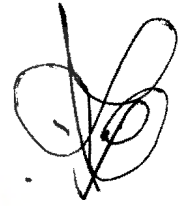
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2002**

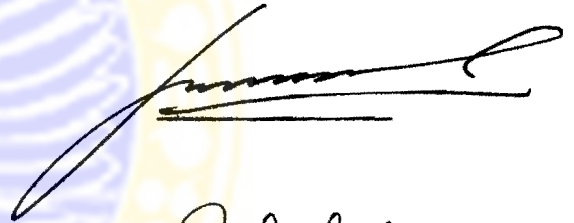
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**

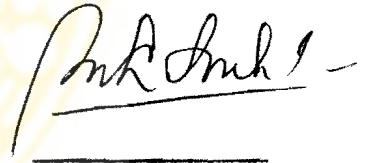
**Ketua : R. Indlarsoro, S.H.**



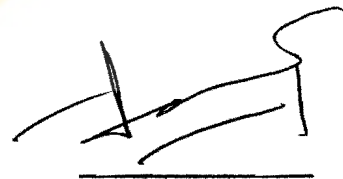
**Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**2. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.**



**3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum mengenai hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita di Indonesia dilakukan dengan jalan :

- Meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 1984, dan
- Mengatur ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan pelanggaran hak- hak reproduksi terhadap buruh perempuan dalam :
  - a. Pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9 dan pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 12 tahun 1948 jo. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1951 ;
  - b. Pasal 2 dan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 tahun 1969 ;
  - c. Pasal 3 Stbl. 1925 Nomor 647 ;
  - d. Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03 / Men / 1989 ;
  - e. Pasal 104, pasal 105 dan pasal 106 Undang- Undang Nomor 25 tahun 1997.

Namun segala peraturan perundang- undangan tersebut tidak ada penerapan dari pihak- pihak yang terkait. Dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran- pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja wanita. Pada tingkat undang-undang

sudah baik pengaturannya namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak selamanya dapat menjamin akan baik pelaksanaannya karena tidak secara otomatis menjadi efektif. Hal ini disebabkan saat pelaksanaan semua tergantung pada para pelaksananya yaitu para pihak yang terkait yang tidak lepas dari kepentingan masing-masing.

Selain itu perusahaan mampu menghasilkan aturan-aturan, anggapan-anggapan dan kebiasaan dalam perusahaan serta untuk menjamin berlangsungnya kepentingan individu yang saling berinteraksi dalam perusahaan. Namun sangat dimungkinkan bahwa masuknya pengaruh dari luar yaitu berbagai pihak yang berkepentingan seperti pengusaha itu sendiri, manager, SPSI beserta tenaga kerjanya yang diantara mereka terdapat aturan-aturan main sendiri. Pengaruh lainnya adalah berupa anggapan-anggapan yang sudah lama hidup yang tidak dipertanyakan lagi seperti stereotip jender serta segala aturan-aturan formal dan informal.

2. Penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan mengenai hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita di Indonesia dilakukan dengan memberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 dalam pasal 17 ayat (2) yang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03 / Men / 1989 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 dalam pasal 6 yang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)



bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969.

Dari peraturan perundang-undangan yang terdahulu hingga sekarang ini yang mengatur mengenai hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita khususnya yang mengatur mengenai ancaman pidana berupa kurungan maupun denda, permasalahan yang utama adalah kecilnya atau ringannya sanksi hukum pada aturan hukum yang terdahulu namun aturan hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan pada aturan hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 mengatur mengenai ancaman pidana yang keras dan tegas, akan tetapi berlakunya ketentuan ini kembali ditunda seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 yaitu mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2002. Padahal maksud dan tujuan dari ancaman pidana dalam aturan hukum yang ada adalah untuk menghentikan setidaknya ada untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja wanita mengenai hak-hak reproduksi. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 03 / Men / 1989 dengan perbandingan kondisi atau keadaan yang berkembang secara pesat bahwa ancaman administratif tidak diatur dan ancaman pidana terlalu ringan adalah tidak relevan dan tidak sesuai lagi yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

## 2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji permasalahan mengenai pelanggaran hak- hak reproduksi tenaga kerja wanita, antara lain :

1. Bahwa sosialisasi dari Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita harus dilakukan secara lebih meluas lagi, dan kajian-kajian terhadap apa yang berlangsung dalam kenyataan empirik di dunia kerja perlu dilakukan untuk memahami apa sebabnya ketentuan-ketentuan yang telah ada di bidang perburuhan belum berlaku secara efektif. Dalam hal ini menghimbau supaya para pengambil kebijaksanaan dan keputusan di bidang hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja serta pemerintah benar-benar mempunyai keinginan untuk berupaya menerapkan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi secara tegas.
2. Perlunya menindak pengusaha yang melakukan pelanggaran hak-hak reproduksi terhadap tenaga kerja wanita dengan menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara kumulatif agar dapat dirasa lebih adil bagi buruh perempuan yang telah dirugikan tersebut. Dan perlu adanya peraturan-peraturan kebijaksanaan lain yang dapat mendukung peraturan-peraturan sebelumnya dan dengan memberlakukan secepatnya Undang-Undang No. 25 tahun 1997, dikarenakan didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pengusaha yang melakukan pelanggaran, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai daya paksa dalam pelaksanaannya.

Demikianlah catatan terhadap permasalahan mengenai pelanggaran hak-hak reproduksi terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia.

